

ANALISIS PERAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA

(Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Jawa Timur)

Oleh
Sutikno, SE,ME

ABSTRAK

Penelitian mempunyai tiga tujuan yaitu: 1) Mengidentifikasi terjadinya kesenjangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Timur. 2) Menganalisis penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi masing-masing kabupaten/kota. 3) Menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada wilayah Jawa Timur.

Alat analisis yang digunakan untuk kondisi ketenaga kerjaan anatar lain: rasio angkatan kerja, rasio pengangguran, dan tipologi permintaan dan penawaran. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja sektoral adalah analisis kontribusi dan elastisitas. Sedangkan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis variabel ekonomi terhadap pengangguran adalah analisis ekonometri dengan model Vector Auto Regresive (VAR).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai tipologi penawaran tenaga kerja rendah dan permintaan tenaga kerja tinggi (SRDT) sebanyak 8 daerah atau 21,05%. Sementara sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan. Sedangkan perubahan inflasi, perubahan upah, dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang memberikan kontribusi terhadap terjadinya pengangguran.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan perkembangan PDRB per kapita per tahun sebenarnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Membaiknya kondisi ekonomi makro tersebut juga ditunjukkan pula dengan perkembangan positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun capaian indikator ekonomi makro tersebut belum diikuti dengan perkembangan indikator mikro. Tampaknya justru terjadi kondisi yang kontradiktif antara indikator ekonomi makro dengan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, artinya indikator makro menunjukkan perbaikan, namun di sisi lain jumlah penganggur dan penduduk miskin semakin banyak.

Tabel 1
Perkembangan Tingkat Pengangguran Di Jawa Timur
(1999 – 2006)

Tahun	Pengangguran (Orang)	Pengangguran (%)
1999	720.234	4,11
2000	753.190	4,52
2001	764.691	4,35
2002	846.295	4,90
2003	870.094	4,81
2004	1.011.170	5,72
2005	1.082.221	5,82
2006	1.012.111	5,38

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, 2007 (Diolah)

Memperhatikan tabel di atas, tampak angka pengangguran yang terjadi sejak tahun 2006 cukup besar, demikian pula angka kemiskinan di Jawa Timur belum menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yakni masih 10.710.022 orang. Apabila ditelusuri penyebab ketidakselarasan antara indikator makro ekonomi dengan penduduk miskin dan penganggur tampaknya lebih banyak disebabkan ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar wilayah, dan kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM secara drastis.

Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai saat ini dapat dikatakan masih rapuh, karena labih banyak ditopang pengeluaran konsumsi dan ekspor, sementara pilar pertumbuhan ekonomi yang riil berupa investasi (PMDN dan PMA) masih sulit untuk diwujudkan. Pemegang ijin investasi tidak secara otomatis merealisasikan proyeknya karena masih harus mencermati perkembangan stabilitas ekonomi nasional, kepastian hukum, situasi politik, dan kondisi lokal.

Pergerakan investasi yang lamban dan dunia usaha yang makin menurun menjadi penyebab sempitnya lapangan kerja, sementara jumlah penduduk dan angkatan kerja bergerak begitu cepat. Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur pada tahun 2007 diperkirakan masih sekitar 28 juta orang atau sekitar 76 persen terhadap jumlah penduduk di Jawa Timur. Selanjutnya jumlah angkatan kerja diperkirakan 19 juta jiwa, yang meliputi kelompok usia produktif (25 – 54 tahun) dan kelompok usia sekolah (15 – 24 tahun).

Sedangkan jumlah penganggur diperkirakan masih sekitar 1.012.111 orang pada tahun 2006, baik karena faktor sempitnya lapangan kerja maupun terhentinya usaha sebagai akibat lesunya kondisi ekonomi. Kondisi ini tampaknya sejalan dengan transisi demografi berupa turunnya angka kelahiran maupun kematian sehingga

kematian sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan permasalahan akibat bertambahnya penduduk usia produktif, karena perekonomian Jawa Timur tidak cukup besar untuk menyediakan lapangan kerja secara optimal bagi pengangguran dan angkatan kerja baru yang cenderung semakin. Melihat permasalahan ketenagakerjaan Jawa Timur di atas, maka diperlukan suatu perencanaan strategis yang bersifat terpadu baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran tenaga kerja.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada kondisi ekonomi makro dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi di wilayah Jawa Timur, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terjadi kesenjangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Timur.
2. Bagaimana potensi penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Timur.
3. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengangguran yang ada wilayah Jawa Timur?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi terjadinya kesenjangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Timur.
2. Menganalisis penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi masing-masing kabupaten/kota.
3. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada wilayah Jawa Timur.

E. METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan utama menganalisis peran sektor ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Analisis ini berangkat dari pendekatan penawaran dan permintaan atau penyerapan tenaga kerja sektoral serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



2. Alat Analisis

a. Model Analisis Diskriptif

Untuk mengukur kondisi ketenaga kerjaan di masing-masing kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur digunakan beberapa alat pengukuran yaitu: rasio angkatan kerja, rasio pengangguran, analisis elastisitas, kontribusi penyerapan tenaga kerja dan tipologi permintaan dan penawaran tenaga kerja.

b. Model Analisis Ekonometri

- *Vector Autoregression (VAR)*

Penelitian ini akan mengolah dan menganalisis data dengan mempergunakan alat analisis *Vector Autoregression* (VAR). VAR merupakan sistem persamaan dinamis yang menguji hubungan antara variabel-variabel ekonomi dengan menggunakan asumsi minimal atas struktur/teori ekonomi yang mendasarinya.

- *Uji Stasioneritas Dicky-Fuller*

Untuk melihat stasioneritas data maka digunakan uji stasioneritas atau uji akar-akar unit dengan Dickey-Fuller test (AD) dan Augmented Dickey Fuller (ADF). Penelitian ini menggunakan Augmented Dickey Fuller (ADF) serta uji Phillips-Perron test (PP) untuk menguji stasioneritas data.

Adapun formulasi uji ADF sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (1)$$

$$\Delta Y_t = a_0 + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (2)$$

$$\Delta Y_t = a_0 + a_1 T + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3)$$

Ditentukan :

Y = variabel yang diamati

$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$

T = trend waktu

- *Uji Vector Auto Regressive*

Analisis VAR mula – mula dikembangkan oleh Christopher Sims pada awal tahun 1980-an sebagai kritiknya pada model-model ekonometrik simultan yang kompleks (Enders, 1995; Gujarati, 1995). Para pengkritik metode analisis VAR adalah Cooley dan Leroy (1985) dan Bernake (1986). Inti kritiknya adalah interpretasi hasil analisis VAR tidak bisa dilepaskan dari suatu model struktural ekonomi makro, untuk itu perlu diintroduksikan batasan-batasan (restriksi) dalam modelnya.

Bentuk umum VAR adalah :

$$\vec{Y}_t = \sum_{i=1}^k A_i \vec{Y}_{t-i} + \varepsilon_t \dots\dots\dots(4)$$

Dimana \vec{Y}_t adalah vektor kolom pada saat t untuk semua observasi, ε_t adalah vektor kolom nilai *random disturbance*, yang mungkin berkorelasi pada saat sekarang satu sama lain tetapi tidak berkorelasi sepanjang waktu. A_i adalah matrik parameter yang semuanya bernilai bukan nol. Bentuk tersebut dapat kita tulis kedalam tiga model persamaan dengan maksimum lag dua;

$$w_t = a_{11}w_{t-1} + a_{12}x_{t-1} + a_{13}y_{t-1} + b_{11}w_{t-2} + b_{12}x_{t-2} + b_{13}y_{t-2} + \varepsilon_{1t} \dots\dots(5)$$

$$x_t = a_{21}w_{t-1} + a_{22}x_{t-1} + a_{23}y_{t-1} + b_{21}w_{t-2} + b_{22}x_{t-2} + b_{23}y_{t-2} + \varepsilon_{2t}$$

$$y_t = a_{31}w_{t-1} + a_{32}x_{t-1} + a_{33}y_{t-1} + b_{31}w_{t-2} + b_{32}x_{t-2} + b_{33}y_{t-2} + \varepsilon_{3t}$$

$$\vec{Y}_t = \begin{pmatrix} w_t \\ x_t \\ y_t \end{pmatrix} \vec{\varepsilon}_t = \begin{pmatrix} \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{2t} \end{pmatrix} \text{ dan } k = 2, \text{ terdapat matrik } 3 \times 3 A_i \dots\dots\dots(6)$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} A_2 = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \dots\dots\dots(7)$$

Matrik diatas mencerminkan bahwa setiap variabel dalam metode model VAR tergantung pada semua variabel yang lain dengan struktur lag yang sama digunakan pada setiap variabel dalam semua persamaan, karena tidak ada restriksi maka semua parameter a dan b adalah nilainya bukan nol.

F. HASIL PENELITIAN

a. Kesenjangan Antara Penawaran Tenaga Kerja Dengan Permintaan Tenaga Kerja

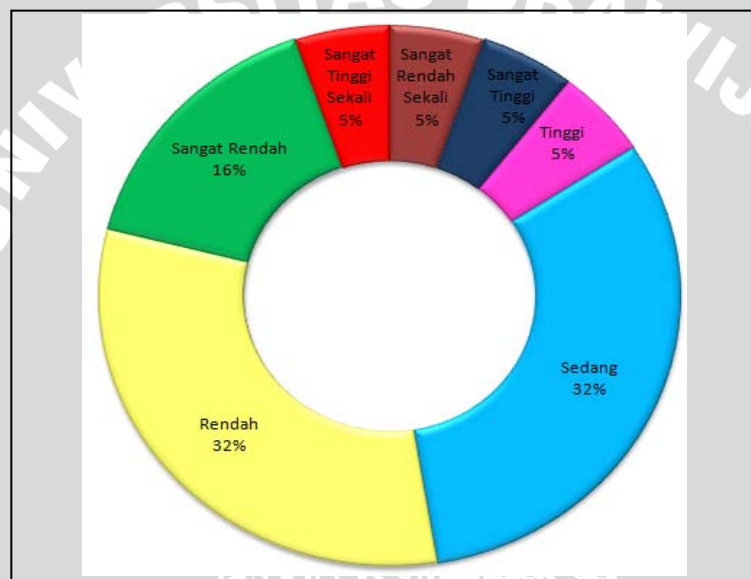
Analisis kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja akan diawali dengan analisis tentang komposisi Angkatan Kerja (AK) dan pengangguran di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa Timur.

1. Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai angkat kerja sangat tinggi sekali sebanyak 5% atau 2 daerah. Angka prosentase tersebut mengandung arti bahwa ada 5% atau 2 dari 38 daerah yang ada di Jawa Timur yang tergolong mempunyai angkatan kerja

sangat tinggi. Berikut ini gambaran kondisi angkatan kerja di wilayah Jawa Timur berdasarkan kondisi angkatan kerja di masing-masing daerah. Daerah yang tergolong mempunyai kondisi tenaga kerja seperti tersebut, perlu mendapat perhatian khusus, karena apabila jumlah angkatan kerja yang sangat tinggi tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan angkatan kerja, maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di daerah tersebut.

Gambar 1
Angkatan Kerja di Wilayah Jawa Timur
Berdasarkan Kondisi Di Masing-Masing Daerah



Sedangkan daerah yang tergolong mempunyai angkatan kerja sangat rendah sekali sebanyak 5% atau 2 daerah. Rata-rata prosentase angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Jawa Timur dari tahun 2004 sampai dengan 2006 sebesar 62,31%.

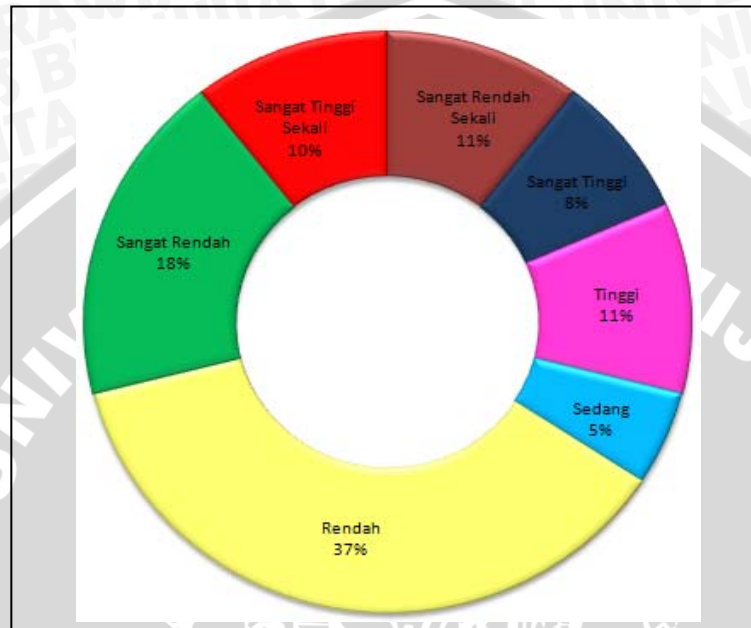
2. Pengangguran

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai pengangguran sangat tinggi sekali sebanyak 10% atau 4 daerah. Angka prosentase tersebut mengandung arti bahwa ada 10% atau 4 dari 38 daerah yang ada di Jawa Timur yang tergolong mempunyai jumlah penganggura sangat tinggi. Berikut ini gambaran kondisi pengangguran di wilayah Jawa Timur berdasarkan kondisi pengangguran di masing-masing daerah. Daerah yang tergolong mempunyai kondisi pengangguran seperti tersebut, perlu mendapat perhatian khusus, oleh sebab itu daerah-daerah

tersebut perlu meningkatkan sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Gambar 2

Kondisi Pengangguran di Wilayah Jawa Timur Berdasarkan Di Masing-Masing Daerah



Sedangkan daerah yang tergolong mempunyai pengangguran sangat rendah sekali sebanyak 11%. Rata-rata Prosentase pengangguran secara keseluruhan di wilayah Jawa Timur dari tahun 2004-2006 sebesar 33,49%.

3. Tipologi Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Berdasarkan analisis tipologi klasen di atas, menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai tipologi penawaran tenaga kerja tinggi dan permintaan tenaga kerja tinggi (STDT) sebanyak 17 daerah atau 44,74% yaitu: 1) Pacitan, 2) Ponorogo, 3) Trenggalek, 4) Tulungagung, 5) Blitar, 6) Kediri, 7) Malang, 8) Banyuwangi, 9) Bondowoso, 10) Situbondo, 11) Probolinggo, 12) Pasuruan, 13) Magetan, 14) Tuban, 15) Lamongan, 16) Pamekasan, dan 17) Sumenep. Daerah yang mempunyai tipologi ini mempunyai sifat relatif seimbang antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun kedepan perlu diwaspadai, karena jika permintaan tenaga kerja di daerah ini mengalami penurunan maka akan berpotensi menciptakan pengangguran yang tinggi.

Daerah yang mempunyai tipologi penawaran tenaga kerja rendah dan permintaan tenaga kerja tinggi (SRDT) sebanyak 8 daerah atau 21,05% yaitu: 1) Lumajang, 2) Mojokerto, 3) Nganjuk, 4) Ngawi, 5) Bojonegoro, 6) Gresik, 7) Sampang, dan 8) Kota Batu. Daerah yang mempunyai tipologi ini berpotensi untuk dijadikan sebagai daerah pusat-pusat penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan karena penawaran tenaga kerja di daerah ini masih tergolong rendah dibanding daerah yang lain, namun permintaan tenaga kerja di daerah relatif tinggi.

Sementara, daerah yang mempunyai tipologi penawaran tenaga kerja tinggi dan permintaan tenaga kerja rendah (STDR) sebanyak 1 daerah atau 2,63% yaitu Kota Kediri. Daerah ini mempunyai sifat berpotensi untuk menimbulkan pengangguran yang tinggi. Kondisi ini disebabkan karena daerah ini mempunyai penawaran tenaga kerja yang relatif tinggi di banding daerah lain, namun tidak ditunjang oleh penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Sedangkan daerah yang mempunyai tipologi penawaran tenaga kerja rendah dan permintaan tenaga kerja rendah (SRDR) sebanyak 12 daerah atau 31,58% yaitu: 1) Jember, 2) Sidoarjo, 3) Jombang, 4) Madiun, 5) Bangkalan, 6) Kota Blitar, 7) Kota Malang, 8) Kota Probolinggo, 9) Kota Pasuruan, 10) Kota Mojokerto, 11) Kota Madiun, dan 12) Kota Surabaya. Daerah yang mempunyai tipologi ini berpotensi untuk dijadikan sebagai daerah pusat-pusat penyerapan tenaga kerja, jika daerah-daerah tersebut mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerjanya. Hal tersebut disebabkan karena, meskipun penyerapan tenaga kerja di daerah ini relatif rendah, namun penawaran tenaga kerja di daerah ini masih tergolong rendah dibanding daerah yang lain.

b. Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis penyerapan tenaga kerja sektoral di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur menunjukkan temuan-temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sangat tinggi sekali adalah Kabupaten Sampang dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 77,86%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Pacitan dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 73,74% dan Kabupaten Pamekasan dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 73,61%.
- Penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian yang tergolong sangat tinggi sekali adalah Kabupaten Trenggalek dengan tingkat

penyerapan tenaga kerjanya sebesar 1,80%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Tuban dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 1,74% dan Kabupaten Tulungagung dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 1,36%.

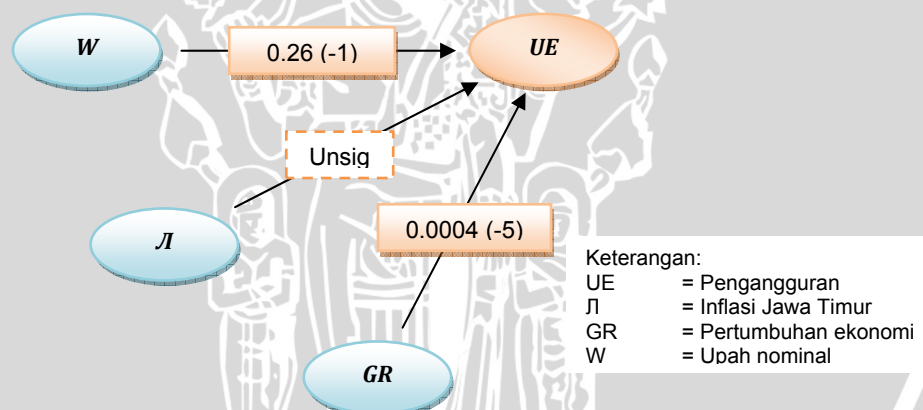
- Penyerapan tenaga kerja sektor Industri pengolahan yang sangat tinggi sekali adalah Kabupaten Sidoarjo dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 38,89% , kemudian diikuti oleh Kota Pasuruan dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 32,58% dan Kabupaten Gresik dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 28,99%.
- Penyerapan tenaga kerja sektor listrik, gas dan air bersih yang tergolong sangat tinggi sekali adalah Kabupaten Pasuruan dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 50,01%.
- Penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi yang sangat tinggi sekali adalah Kabupaten Malang dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 6,91%, diikuti oleh Kota Kediri dan Kota Malang dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar masing-masing 6,63%.
- Penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran yang sangat tinggi sekali adalah Kota Madiun dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 35,42%, kemudian diikuti oleh Kota Surabaya dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 34,73% dan Kota Blitar dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 34,26%.
- Penyerapan tenaga kerja sektor pengangkutan dan komunikasi yang tergolong sangat tinggi sekali adalah Kota Probolinggo dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 14,68%, kemudian diikuti oleh Kota Madiun dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 10,04% dan Kota Pasuruan dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 9,77%.
- Penyerapan tenaga kerja sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tergolong sangat tinggi sekali adalah Kota Surabaya dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 4,22%, kemudian diikuti oleh Kota Malang dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 3,75% dan Kota Madiun dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 3,30%.
- Penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa yang tergolong sangat tinggi sekali adalah Kota Madiun dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya

sebesar 31,86%, kemudian diikuti oleh Kota Blitar dengan penyerapan tenaga kerjanya sebesar 28,42% dan Kota Malang dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya sebesar 25,54%.

c. Variabel Makro dan Masalah Pengangguran di Jawa Timur

Berdasarkan model kointegrasi *distributed lag* pengangguran Jawa Timur di atas, R^2 model yang sebesar 0.9923, menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perubahan tingkat pengangguran di Jawa Timur, 99.23% merupakan kontribusi dari perubahan tingkat inflasi (π), perubahan upah (W), dan pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur (GR). Sedangkan sisanya ($\pm 0.77\%$) merupakan sumbangan variabel-variabel lain di luar model. Nilai R sebesar 99.61% menunjukkan bahwa hubungan tingkat inflasi, upah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur adalah sangat kuat dengan arah yang positif.

Gambar 3
Hubungan Upah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Jawa Timur



Sumber: Hasil analisis ekonometrik

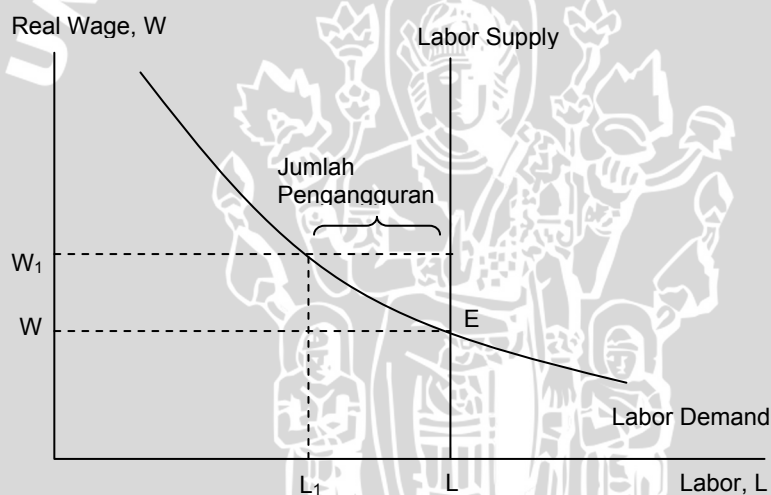
Dari kedua penyebab tersebut, kenaikan upah merupakan penyebab utama masalah pengangguran di Jawa Timur jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Walaupun sama-sama tidak elastis, elastisitas kenaikan tingkat upah terhadap pengangguran terbukti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. Kenaikan tingkat upah sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan jumlah pengangguran sebesar 0.26%.

Bersama-sama dengan upah dan pertumbuhan ekonomi, inflasi memang memiliki kontribusi terhadap masalah pengangguran. Ketika analisis dilakukan secara parsial, inflasi sebenarnya arah hubungan yang negatif dengan pengangguran, namun hubungan tersebut adalah tidak meyakinkan atau tidak

signifikan (signifikan hanya ketika *confidence coefficient* kurang dari 53.70%). Hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Kurva Philips dalam jangka panjang yang berbentuk garis vertikal.

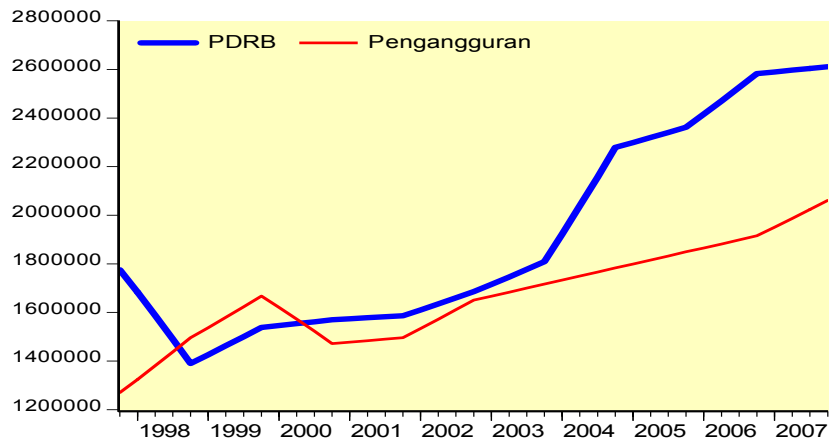
Upah merupakan salah satu penyebab masalah pengangguran di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan signifikannya hubungan antara variabel upah dengan tingkat pengangguran itu sendiri, walaupun tidak elastis. Tanda positif pada koefisien variabel upah menunjukkan hubungan yang searah di antara kedua variabel tersebut. Artinya, kenaikan tingkat upah justru akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Untuk menjelaskannya, perlu mengaitkan kembali dengan teori kekakuan upah (*wage rigidity*) karena temuan ini selaras dengan teori tersebut.

Gambar 4
Wage Rigidity Menyebabkan Pengangguran di Jawa Timur



Teori kekakuan upah (*wage rigidity*) menyatakan bahwa salah satu penyebab masalah pengangguran adalah upah, yaitu ketika terjadi kekakuan upah (*wage rigidity*) dimana upah gagal bergerak menuju posisi keseimbangan pada pasar tenaga kerja (Mankiw 1997). Upah tidak selalu bisa fleksibel, ketika diterapkan kebijakan mengenai upah minimum (sebesar W_1) di atas tingkat keseimbangannya maka yang terjadi adalah kekakuan upah. Upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum itu sendiri. Upah tidak akan turun (*rigid*) ke W akibat adanya kebijakan upah minimum sebesar W_1 . Karena itu, sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerjanya menjadi L_1 sehingga timbul pengangguran sebesar L dikurangi L_1 .

Gambar 5
Pengangguran dan PDRB Jawa Timur
(PDRB harga konstan 1997. dalam Rp 50.000)



Sumber: Hasil Analisis Eknomoterik

Pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur juga berhubungan dengan masalah pengangguran, walaupun sangat lemah, sangat tidak elastis (hampir tidak elastis sempurna). Jika dibandingkan dengan upah yang hubungannya dengan pengangguran sangat meyakinkan ($\alpha = 1\%$), hubungan pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur dengan pengangguran hanya nyata pada $\alpha = 15\%$. Hal ini menunjukkan masih lemah dan belum nyata peran dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terhadap masalah pengangguran. Bahkan, tanda positif pada koefisien pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan tingkat penganggurannya. Artinya, makin tumbuh perekonomian Jawa Timur justru berdampak pada makin tingginya tingkat pengangguran di Jawa Timur, walaupun lemah dan sangat tidak elastis. 1% pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran sebesar 0.0004%. Temuan ini juga didukung oleh kenyataan seperti yang disajikan pada gambar di atas, yaitu ketika perekonomian Jawa Timur tengah tumbuh, jumlah pengangguran juga tumbuh. Karena itu, perlu untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengapa pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur belum mampu berperan nyata mengurangi angka pengangguran.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur menunjukkan temuan yang dapat disimpulkan bahwa daerah yang mempunyai tipologi penawaran tenaga kerja tinggi dan permintaan tenaga kerja tinggi (STDT)

sebanyak 17 daerah atau 44,74%. Daerah yang mempunyai tipologi penawaran tenaga kerja rendah dan permintaan tenaga kerja tinggi (SRDT) sebanyak 8 daerah atau 21,05%. Daerah yang mempunyai tipologi penawaran tenaga kerja tinggi dan permintaan tenaga kerja rendah (STDR) sebanyak 1 daerah atau 2,63%. Dan daerah yang mempunyai tipologi penawaran tenaga kerja rendah dan permintaan tenaga kerja rendah (SRDR) sebanyak 12 daerah atau 31,58%.

Berdasarkan hasil analisis penyerapan tenaga kerja sektoral di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur menunjukkan temuan yang dapat disimpulkan bahwa sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel makro terhadap pengangguran di Jawa Timur, menunjukkan temuan yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan model kointegrasi *distributed lag* menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0.9923, hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perubahan tingkat pengangguran di Jawa Timur, 99.23% merupakan kontribusi dari perubahan tingkat inflasi (JI), perubahan upah (W), dan pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur (GR). Sedangkan sisanya ($\pm 0.77\%$) merupakan sumbangan variabel-variabel lain di luar model.

b. Saran

Dari hasil hasil temuan penelitian, maka beberapa implikasi terhadap kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor unggulan untuk dijadikan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Jadi langkah yang paling urgen untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkaitan dengan sektoral di masing-masing kabupaten/kota adalah menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tiga sektor ekonomi di atas.
- Pengembangan industri pengolahan baik besar, menengah maupun kecil sebaiknya didukung oleh sektor pertanian, sehingga industri yang dikembangkan bertumpu pada kekuatan daerah dan mempunyai keterkaitan kebelakang maupun kedepan yang kuat agar tercipta penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
- Untuk lebih meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sebaiknya peningkatan sektor potensi dalam menyerap tenaga kerja, harus mampu

meningkatkan sektor yang lainnya dan sebaliknya sektor potensi perlu pula didukung sektor lainnya, oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten/kota dan swasta daerah perlu tindakan pro aktif, konduktif dan konstruktif untuk merangsang tumbuhnya minat penanaman modal di daerah.

- Langkah kebijakan yang perlu juga dilakukan untuk mendukung sektor potensial dalam penyerapan tenaga kerja adalah peningkatan dan pembenahan kualitas SDM melalui penyuluhan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.
- Pertumbuhan ekonomi ternyata belum bisa berpengaruh secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian dalam upaya penanggulangi pengangguran di daerah, selain mengunakan pendekatan sektoral, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah meningkatkan aktivitas ekonomi yang bersifat padat karya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M Idris. 2007. Pengembangan Ekonomi Rakyat. www.ekofeum.or.id.
- Abdul Halim, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistika Jawa Timur. 2006. Statistik Indonesia (Jawa Timur Dalam Angka).
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1985, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Dita, Amelia Rizki. 2007. Analisis Konsentrasi Spasial Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil di Kabupaten Malang. Skripsi Tidak Dipublikasikan.
- G, Richrad, Lipsey Dan O, Peter, Steiner. 1986. Pengantar Ilmu Ekonomi; Jilid III, Bina Aksara ; Jakarta.
- Gujarati, Damodar, 1978. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga. Jakarta.
- Irawan Dan Suparmoko, M. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. BPFE; Yogyakarta
- Jhingan, ML. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan. D. Ruritno. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lincoln Arsyad, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- , 1999, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Maisaroh, Siti. 2007. Pengaruh Tingkat Upah, Penjualan dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Skripsi Tidak Dipublikasikan.
- Maulana Yusuf, 1999, "Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota", ***Ekonomi Dan Keuangan Indonesia***, Volume XVII, Nomor. 2.
- Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- , 2002, *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mustasya, Tata. 2005. Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel : Tepatkah Untuk Indonesia Saat Ini?. www.theindonesianinstitute.com.
- Piter Abdullah et.al. 2002, *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Ritmayanti, Mery. 2006. Analisis Spasial Industri Manufaktur Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja Penyerapan Tenaga Kerja. Skripsi Tidak Dipublikasikan.
- Siagian, H, 1992, *Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita Dan Realita*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Siamnjuntak. Payman J., 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta
- Sitohang, Paul, 1977, *Pengantar Perencanaan Regional*, LPFE UI, Jakarta.
- Soeratno, dan Lincoln Arsyad. 1999, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

- Sumitro Djojohadikusumo, 1994, *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Suparmoko, M. Irawan, 1996, *Ekonomika Pembangunan Edisi 5*, BPFE, Yogyakarta
- Silalahi, Levi. 2004. Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009. www.tempointeraktif.com (diakses agustus 2007).
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: FE UI.
- Soemitro Djojohadikusumo, 1985. *Ekonomi Pembangunan*. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 1995. *Makro Ekonomi*. Edisi 1, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sony. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suryawati. 2006. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN.
- Thee Kian Wie, 1983, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemerataan. Beberapa Pendekatan Alternatif*. LP3ES, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan. Haris Munandar. Erlangga. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1986. *Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode*. Terjemahan. Siswo Suyanto. Intermedia. Jakarta.
- Usriansyah. 2007. Solusinya Buka Lapangan Kerja. www.lowongankerjas.com.
- Wangke. Freddy, 2002, "Penetapan sektor Basis Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kabupaten Bekasi", *ATMA nan JAYA*, Edisi April 2002.

